

STUDIA ADMINISTRASI

Pendidikan Politik Dan Peran Perempuan Dalam Penguatan Demokrasi Lokal (Studi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

¹Diah Vitaloka, ²Herwan

^{1,2} Institut Pahlawan 12.

Email: diahvitaloka1379@gmail.com¹, herwanmasyud@stisipol.ac.id²

ABSTRAK

Kajian tentang Pendidikan politik merupakan instrumen strategis dalam membangun demokrasi yang partisipatif dan inklusif. Dalam konteks demokrasi lokal, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses, representasi, dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi dan kapasitas politik perempuan serta implikasinya terhadap penguatan demokrasi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2019), dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi terhadap organisasi perempuan, program Pendidikan politik serta kebijakan daerah terkait pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan politik berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan, namun pelaksanaannya belum terlembagakan secara berkelanjutan dan masih bersifat programatik. Peran perempuan dalam demokrasi lokal cenderung terfokus pada aktivitas sosial dan partisipatif, sementara keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Artikel ini merekomendasikan penguatan kebijakan pendidikan politik yang terintegrasi, berkelanjutan dan responsif gender sebagai prasyarat penguatan demokrasi lokal.

Kata kunci : Pendidikan Politik, Perempuan, Demokrasi Lokal, Partisipasi Politik

STUDIA ADMINISTRASI

ABSTRACT

The study of political education is a strategic instrument in building a participatory and inclusive democracy. In the context of local democracy, women still face limited access, representation, and influence in the public decision-making process. This article aims to analyze the role of political education in increasing women's political participation and capacity and its implications for strengthening local democracy in the Bangka Belitung Islands Province. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies of women's organizations, political education programs, and regional policies related to women's empowerment. The results show that political education contributes to increasing women's political awareness, but its implementation has not been institutionalized in a sustainable manner and remains programmatic. Women's roles in local democracy tend to focus on social and participatory activities, while involvement in strategic decision-making processes remains limited. This article recommends strengthening integrated, sustainable, and gender-responsive political education policies as a prerequisite for strengthening local democracy.

Keywords: Political Education, Women, Local Democracy, Political Participation

PENDAHULUAN

Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilu dan prosedur formal, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana warga negara memiliki ruang nyata untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi salah satu unsur penting karena melalui proses tersebut warga dapat memahami hak, kewajiban serta perannya dalam kehidupan demokratis (Budiardjo, 2010; Amril, 2004).

Dalam konteks demokrasi lokal, perempuan sebenarnya memiliki potensi sosial yang besar. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, mulai dari organisasi sosial hingga forum warga. Namun demikian, partisipasi tersebut belum

STUDIA ADMINISTRASI

sepenuhnya berkembang menjadi kekuatan politik yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik.

Bagi keberlangsungan demokrasi yang lebih berkualitas, demokrasi lokal memegang peranan penting sebagai fondasi sistem politik (Almond, 1999; Gafar, 2000). Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilu, tetapi juga oleh tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan warga agar mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berbagai program pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan, namun dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan masih tergolong terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas politik perempuan masih perlu ditingkatkan agar partisipasi mereka tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berpengaruh dalam ranah politik.

Kesenjangan antara tujuan kebijakan Pendidikan politik dan realitas yang dihadapi perempuan ditingkat lokal masih terlihat jelas. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai peran pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam demokrasi lokal, termasuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang membantu warga negara memahami kehidupan politik secara lebih sadar dan kritis, baik melalui jalur formal maupun pengalaman sehari-hari, aktivitas organisasi serta interaksi sosial di masyarakat.

Dalam konteks demokrasi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dinamika yang berkembang memperlihatkan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, dalam mengawal proses demokrasi. Perempuan memiliki peran strategis, baik sebagai pemilih, penggerak komunitas, maupun sebagai aktor yang dapat memengaruhi arah kebijakan publik. Namun demikian, keterlibatan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat struktural, kultural, maupun keterbatasan akses terhadap pendidikan politik yang memadai.

Dari perspektif demokrasi, posisi perempuan sesungguhnya sangat penting. Kehadiran perempuan dalam ruang politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah keterwakilan, tetapi juga

STUDIA ADMINISTRASI

menyangkut perspektif dan kepentingan yang mereka bawa dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, hambatan struktural dan kultural masih membatasi peran perempuan, terutama di tingkat lokal. Padahal, demokrasi lokal menyediakan ruang interaksi yang lebih dekat antara warga dan pengambil kebijakan, sehingga pendidikan politik menjadi instrumen strategis untuk mendorong partisipasi perempuan secara lebih kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2019) dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informan penelitian terdiri atas pengurus organisasi perempuan, tokoh masyarakat, akademisi serta aparatur pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk memahami pola, makna dan dinamika pendidikan politik perempuan di tingkat lokal.

Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk pendidikan politik yang berjalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam penguatan demokrasi lokal. Penelitian ini juga menelaah faktor-faktor pendukung dan penghambat keterlibatan perempuan dalam politik (Ayu, 2023), termasuk keterkaitannya dengan tingkat partisipasi dalam demokrasi lokal serta hubungan antara pendidikan politik dan peningkatan peran perempuan dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa cara. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi dan strategi Perempuan dalam mengikuti proses pendidikan politik. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan politik lokal, seperti seminar dan forum Perempuan. Sementara itu, dokumentasi diperoleh melalui penelusuran arsip, laporan KPU maupun Bawaslu, media lokal serta dokumen organisasi terkait lainnya.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data merupakan tahap awal yang dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi

STUDIA ADMINISTRASI

maupun dokumentasi. Tahap ini bertujuan menyaring data agar sesuai dengan fokus penelitian sehingga memudahkan proses analisis lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pendidikan Politik

Secara konseptual, pendidikan politik tingkat lokal merupakan suatu proses berkelanjutan yang perlu dilaksanakan secara konsisten untuk meningkatkan kapasitas kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik (Khaz & Refdi, 2024). Proses ini bertujuan memperluas pengetahuan politik warga sehingga mereka mampu berperan aktif dalam kehidupan demokrasi lokal dan berkontribusi pada terbentuknya budaya politik yang sehat, kritis dan partisipatif. Melalui peningkatan kesadaran politik, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam bidang politik, yang pada akhirnya dapat mendorong meningkatnya partisipasi warga (Martini et al., 2018), terutama dalam kegiatan seperti pemilihan umum, musyawarah desa maupun proses perumusan kebijakan daerah. Dengan demikian, penguatan pendidikan politik berimplikasi langsung pada berkembangnya budaya demokrasi yang lebih matang.

Pada praktiknya, pendidikan politik di tingkat lokal dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh partai politik (Putra, 2016). sebagai lembaga yang memiliki fungsi pendidikan politik, partai politik berperan dalam menjalankan berbagai aktivitas, antara lain sosialisasi politik, agregasi kepentingan, komunikasi politik serta penyaluran aspirasi masyarakat. Selain melalui partai politik, Pendidikan politik juga dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, seminar, maupun penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik sebagai sarana edukasi publik. Bentuk lain dari pendidikan politik turut dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas kepemudaan serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki perhatian terhadap penguatan partisipasi politik warga.

Pola pendidikan politik bagi para pemangku kepentingan di bidang politik pada dasarnya dapat dijalankan sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor, namun tetap

STUDIA ADMINISTRASI

memerlukan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Pemerintah berperan melalui penyediaan regulasi, sosialisasi kebijakan serta pembukaan ruang partisipasi bagi masyarakat. Di sisi lain, partai politik memiliki fungsi strategis dalam memberikan edukasi politik kepada kader maupun masyarakat, terutama terkait pemahaman visi, misi dan program kerja politik.

Peran tokoh masyarakat juga tidak kalah penting karena mereka berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dilingkungan sosialnya. Selain itu, media sosial turut menjadi sarana yang semakin berpengaruh dalam memfasilitasi masyarakat memperoleh informasi politik yang relevan sekaligus membentuk opini publik yang konstruktif. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya berperan dalam memberikan pendidikan politik yang bersifat kritis serta melakukan advokasi terhadap kebijakan publik.

Berkaitan dengan kondisi ideal tersebut, penting untuk melihat sejauh mana pendidikan politik lokal telah berjalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, diperoleh gambaran umum bahwa pendidikan politik bagi perempuan di Bangka Belitung umumnya dilaksanakan melalui kegiatan organisasi perempuan serta program sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut terbukti membantu meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak dan kewajiban politik, terutama dalam konteks pemilu dan partisipasi warga.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan politik tersebut belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan dan masih terbatas pada aspek peningkatan pengetahuan dasar. Upaya penguatan kapasitas kepemimpinan politik perempuan juga belum menjadi fokus utama. Dalam praktiknya, perempuan masih lebih sering ditempatkan sebagai peserta kegiatan dibandingkan sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, peran perempuan dalam demokrasi lokal cenderung lebih terlihat pada aktivitas sosial dan administratif, sementara keterlibatan dalam proses kebijakan strategis masih relatif terbatas.

Temuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan politik belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi yang mampu memperkuat posisi perempuan dalam demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan

STUDIA ADMINISTRASI

berorientasi jangka panjang agar pendidikan politik tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mampu mendorong perubahan yang substantif dalam partisipasi dan kepemimpinan politik perempuan.

Program yang dijalankan dalam upaya peningkatan Pendidikan politik lokal khususnya bagi kaum Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain berupa sosialisasi pemilu Perempuan yang diselenggarakan oleh KPU dan Kesbangpol, serta kegiatan kolaboratif antar organisasi Perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, Fatayat NU, Aisyiyah dalam memberikan edukasi terkait politik dan demokrasi. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperluas pemahaman politik perempuan di tingkat lokal.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan akses dan jangkauan sasaran. Program yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kelompok perempuan secara merata. Kondisi ini berdampak pada tingkat partisipasi perempuan dalam politik lokal masih relatif rendah, baik dalam keterlibatan di Lembaga legislatif seperti DPRD maupun dalam jabatan eksekutif lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Perempuan Dalam Politik dan Partisipasi Demokrasi Lokal

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pendidikan politik lokal berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik Perempuan di wilayah, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun yang memengaruhi fenomena tersebut. Berdasarkan temuan penelitian terkait faktor pendukung keterlibatan Perempuan dalam politik (Ayu, 2023 serta dinamika partisipasi demokrasi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa secara normatif telah tersedia landasan regulasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satunya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% Perempuan dalam daftar calon legislatif. Ketentuan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik dan menjadi bagian dari sistem perwakilan di Indonesia.

STUDIA ADMINISTRASI

Selain dukungan regulasi, keberadaan organisasi Perempuan juga menjadi faktor penting yang memperkuat partisipasi politik perempuan. Organisasi seperti PKK, Dharma Wanita, Fatayat NU dan Aisyiyah berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada Perempuan, khususnya terkait pemahaman hak politik, penguatan kapasitas kepemimpinan Perempuan serta peningkatan kesadaran partisipasi politik dalam lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peran ini semakin diperkuat oleh keterlibatan Lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah, seperti KPU dan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula di lingkungan sekolah, termasuk kepada siswi, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik sejak usia dini.

Faktor pendukung lainnya adalah peran akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat lokal. Komunitas sipil kerap menyelenggarakan seminar, lokakarya serta berbagai kegiatan ilmiah lain yang mengangkat isu kesenjangan gender melalui kajian maupun diskusi publik. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan ditingkat lokal. Selain itu, keberadaan figur perempuan yang telah menduduki posisi di DPRD maupun pemerintah daerah, meskipun jumlahnya masih terbatas, mulai menunjukkan kecenderungan positif dalam meningkatkan keterlibatan Perempuan di arena politik daerah.

Di samping faktor pendukung tersebut, pendidikan politik lokal dalam meningkatkan partisipasi politik Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah kuatnya budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat, dimana norma sosial cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam ranah politik. Kondisi ini memengaruhi persepsi masyarakat sehingga perempuan masih kerap dipandang kurang layak menempati posisi kepemimpinan politik.

Hambatan lainnya berkaitan dengan masih kuatnya praktik politik uang dan pola patronase di tingkat lokal. Situasi ini menyulitkan kader perempuan yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi untuk bersaing dengan kandidat lain yang memiliki dukungan finansial lebih kuat. Dampaknya juga terlihat pada implementasi kebijakan kuota

STUDIA ADMINISTRASI

30% keterwakilan perempuan dalam partai politik, yang dalam praktiknya sering kali hanya dipenuhi sebagai persyaratan administratif. Akibatnya, ruang strategis bagi perempuan untuk menempati posisi penting dalam struktur partai masih relatif terbatas.

3. Hubungan Antara Pendidikan Politik Dengan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Memperkuat Demokrasi Lokal

Pada bagian ini menguraikan hubungan konseptual antara Pendidikan politik lokal dengan peningkatan peran Perempuan. Pendidikan politik merupakan fondasi penting dalam upaya memperkuat partisipasi politik masyarakat, khususnya Perempuan, karena melalui proses tersebut perempuan dapat lebih memahami hak-hak politiknya, yaitu hak memilih, hak dipilih, hak berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, Pendidikan politik juga berperan dalam membentuk sikap kritis melalui kemampuan menilai informasi publik dan memahami kapasitas kandidat secara rasional. Pelaksanaan Pendidikan politik melalui forum resmi maupun kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam menyampaikan aspirasi secara tepat dan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Lebih jauh Pendidikan politik diharapkan mampu mendorong peningkatan representasi Perempuan dalam ranah politik. Hal ini tercermin dari keberanian perempuan untuk tampil sebagai kandidat dalam kontestasi politik, berpartisipasi dalam struktur kepengurusan organisasi politik, serta menempati posisi-posisi strategis dalam lembaga pemerintahan. Peningkatan partisipasi tersebut berpotensi mengurangi dominasi budaya patriarki, karena semakin terbuka ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pendidikan politik dapat berfungsi sebagai katalisator bagi penguatan peran perempuan dalam demokrasi lokal. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan pola pelaksanaan yang berkelanjutan, terukur, dan memiliki jangkauan yang lebih luas agar mampu menjangkau seluruh kelompok

STUDIA ADMINISTRASI

perempuan secara merata. Dengan demikian, Pendidikan politik tidak hanya berperan sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai instrument transformasi sosial yang berkontribusi pada terbentuknya praktik demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal. Peran tersebut semakin relevan dengan adanya regulasi yang mendorong keterlibatan Perempuan dalam struktur partai politik, termasuk ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih sering bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen substantif terhadap penguatan peran perempuan. Kondisi ini diperkuat oleh masih kuatnya budaya patriarki di daerah, yang menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk menempati posisi strategis dalam organisasi politik, khususnya di provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Tanpa dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan sensitif terhadap isu gender, Pendidikan politik berpotensi berhenti pada tataran seremonial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat program Pendidikan politik yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Pendekatan tersebut penting untuk mendorong perempuan agar lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sebagai rekomendasi, penguatan Pendidikan politik bagi perempuan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, akses terhadap sumber daya politik serta perluasan ruang partisipasi yang inklusif. Selain itu, strategi kolaboratif lintas Lembaga perlu dikembangkan agar program Pendidikan politik tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata dalam representasi dan peran perempuan dalam demokrasi lokal. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan perempuan di ruang politik diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya tata kelola demokrasi lokal yang lebih partisipatif, inklusif dan berkeadilan.

STUDIA ADMINISTRASI

DAFTAR PUSTAKA

- Amril, G. (2004). *Pendidikan Politik Rakyat dalam Membangun Demokrasi*. Bandung: PPS UNPAD.
- Almond, G. (1999). *Comparative Politics Today: A World View*. New York: Longman.
- Ayu, D. R. (2023). Peran Perempuan dalam Politik Lokal: Antara Representasi, Kekuasaan, dan Keadilan Gender. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Gafar, A. (2000). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khaz, F. H., & Refdi. (2024). Pendidikan Politik Bagi Perempuan sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik. *Pesat: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 239–243.
- Martini, E., Azwar, I., & Pringga, F. S. (2018). Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Putra, A. D. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2).
- Ranto, & Abbas, R. M. (2019). Efektivitas Pengawasan Partisipatif Pemilu pada Bangka Belitung 2017. *Journal of Politics and Policy*, 1(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

STUDIA ADMINISTRASI